

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PARA PIHAK TERKAIT  
JUAL BELI INFORMASI RAHASIA TERHADAP PELANGGARAN HAK  
PRIVASI BAGI PUBLIK FIGUR SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA  
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Heddy Yuspita  
(15887025)

**ABSTRAK**

Komunikasi antar manusia didukung oleh perkembangan teknologi dan informasi. Media sosial sering disalahgunakan untuk menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Berita tersebut berkaitan dengan publik figur yang informasi rahasianya tersebar luas oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan diperjualbelikan sehingga melanggar hak privasi publik figur. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum untuk para pihak yang memperjualbelikan informasi rahasia ini dan perlindungan hukum untuk publik figur terkait pelanggaran hak privasinya menurut hukum positif yang ada di Indonesia yang dapat dikaji berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan konsep pendekatan penelitian undang-undang dan kasus. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara *legal research* yaitu membaca buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder adalah buku atau jurnal mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan penelitian ini, telah diperoleh hasil yaitu untuk publik figur yang dirugikan atas penyebaran informasi rahasia di media sosial ini dapat mengajukan gugatan di Pengadilan. Perlindungan hukum bagi publik figur yang mengacu pada peraturan perundang-undangan terdapat dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 26, Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (2) dan 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Belum adanya regulasi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan ini di Indonesia dan pemerintah harus segera membuat undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi terkait permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini.

**Kata Kunci:** *pertanggungjawaban hukum, perlindungan hukum, jual beli informasi rahasia, hak privasi, publik figur*

*JURIDICAL ANALYSIS ACCOUNTABILITY THE PARTIES RELATED THE  
BUYING AND SELLING OF CONFIDENTIAL INFORMATION FOR BREACHES  
PRIVACY RIGHTS FOR PUBLIC FIGURE AND THE CONSERVATION AND  
SAFETY OF BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA*

Heddy Yuspita  
(15887025)

**ABSTRACT**

*Communication between humans supported by the development of technology and information. Sosial media often abused to spread the word who are not necessarily the truth. The news was related to the public figure who information the secret widespread through social media by people irresponsible and was breaking privacy rights of public figure. The purpose of this study is to find legal accountability to the buy and sell the secret information and legal protection to public figure related to the violations of the rights privacy according to laws of positive in Indonesia that can be assessed according to it's article 1320 book of the civil code, article 310 book the act of criminal law, and of the laws number 11 of 2008 about information and electronic transaction.*

*The method used is normative juridical, is descriptive analytical approach to research the act by means of the concept and cases. This research using secondary data collected by means legal research is means read book, journals and legislations. Legal matherial primary using this reserach is book of the civil code, book the act of criminal law, and law number 11 of 2008 about information and electronic transaction. Legal matherial secondary is books, journals about information, and eletronic transaction.*

*Based on this research, Have the results the public figure wrong for the dissemination of secret information in social media to propose a suit in court. Legal protection for publik figure referring to the legislation contained in article 310 book the act of criminal law, Article 26, Article 27 paragraph 3, Article 45 paragraph 2, Article 28 paragraph 2, Article 45 paragraph 2 laws number 11 of 2008 about information and electronic transaction. The absence of regulations law and legislation which governing this problem in Indonesia and goverment would have to make legislation specifically on the protection of personal data relating legal issues discussed in this research.*

**Keyword :** *legal liabillity, legal protection, buy and sell, secret information, privacy right, public figur*

## DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
1. Kerangka Teoritis.....	11
2. Kerangka Konseptual.....	17
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian.....	19

3. Jenis dan Sumber Data.....	20
4. Pendekatan Penelitian .....	21
5. Teknik Pengumpulan Data.....	22
6. Teknik Analisis Data.....	22
G. Sistematika Penulisan.....	23

**BAB II JUAL BELI INFORMASI RAHASIA (TERKAIT PELANGGARAN HAK PRIVASI) BERDASARKAN HUKUM POSITIF YANG ADA DI INDONESIA**

A. Pengertian Jual Beli.....	26
B. Asas-Asas dalam Perjanjian.....	29
C. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli.....	33
D. Unsur-unsur Terjadinya Jual Beli.....	36
E. Kewajiban Para Pihak di Dalam Perjanjian Jual Beli.....	38
F. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli.....	40
G. Pengertian Informasi Rahasia terkait Pelanggaran Hak Privasi.....	43

**BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PUBLIK FIGUR ATAS PELANGGARAN HAK PRIVASI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

A. Perlindungan Hukum Bagi Subjek Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	49

2. Unsur-unsur Perlindungan Hukum.....	50
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	51
4. Subjek dalam Perlindungan Hukum.....	52
5. Pengaturan Perlindungan Hukum.....	56
<b>B. Pengertian Publik Figur</b>	
1. Pengertian Publik Figur.....	57
2. Peran Publik figur.....	59
3. Hak dan Kewajiban Publik Figur.....	62
<b>C. Perlindungan Hukum bagi Publik Figur dan Peraturan yang terkait dengan informasi yang melanggar hak privasi menurut Hukum Positif di Indonesia.....</b>	
	67
 <b>BAB IV ANALISIS YURIDIS PERTANGGJAWABAN PARA PIHAK TERKAIT JUAL BELI INFORMASI RAHASIA TERHADAP PELANGGARAN HAK PRIVASI BAGI PUBLIK FIGUR SERTA PERLINDUNGAN HUKUMNYA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.</b>	
 <b>A. Pertanggungjawaban Hukum Para Pihak Mengenai Jual Beli Informasi Rahasia Terhadap Publik Figur.....</b>	
	73
 <b>B. Perlindungan hukum untuk publik figur terkait penyebaran informasi yang mengandung informasi yang tidak valid berdasarkan hukum positif di Indonesia.....</b>	
	85

**BAB V PENUTUP**

A. SIMPULAN..... 98

B. SARAN..... 100

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN.....**

**CURRICULUM VITAE.....**

